



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



pusakom.pom.go.id



pusakom.bpom



pusakom.bpom



pusakombpom

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkat-Nya yang melimpah kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pelaporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu elemen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahunan ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025. Selain itu, laporan ini berisi evaluasi pencapaian Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan disusun secara periodik setiap triwulan dalam bentuk Laporan Kinerja Interim dan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan. Penyusunan laporan secara periodik ini bertujuan untuk mengevaluasi progres dan pencapaian perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja. Selain itu laporan kinerja juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2025 dan evaluasi tahun pertama Renstra 2025-2029.

Laporan Kinerja Tahunan ini berisi perencanaan kinerja tahunan sasaran dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target tahun 2025, faktor penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mendalam terkait pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025, evaluasi tindak lanjut rekomendasi dalam upaya pencapaian target kinerja, analisis gap dan analisis trend pencapaian sasaran pada periode Renstra

tahun 2025-2029 dan evaluasi realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam perumusan, pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan Obat dan Makanan dimasa yang akan datang serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Diharapkan laporan ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025.

Jakarta, 25 Februari 2026
Kepala Pusat Analisis Kebijakan
Obat dan Makanan,



Syamsidar Thamrin, S.T., M.B.A.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai dengan dokumen Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki dua (2) sasaran kegiatan dan enam (6) indikator kinerja utama. Dari enam indikator utama tersebut, dua (2) indikator kinerja memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” dan tiga (3) indikator kinerja memperoleh capaian dengan kategori “Baik” dan satu (1) indikator kinerja memperoleh kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Pernyataan capaian enam indikator kinerja pada tahun anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan dengan nilai realisasi 87,32 dengan capaian 100,37% dengan kategori capaian Sangat Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini telah secara efektif dilaksanakan serta anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini telah digunakan secara efisien.
2. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan dengan nilai realisasi 91,69 dengan capaian 100,76% dengan kategori capaian Sangat Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini telah secara efektif dilaksanakan serta anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini telah digunakan secara efisien.
3. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan nilai realisasi 85,86 dengan capaian 99,26% dengan kategori capaian Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini belum sepenuhnya efektif dilaksanakan sehingga anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini menjadi belum digunakan secara efisien.
4. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan nilai realisasi 80,75 dengan capaian 98,48% dengan kategori capaian Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini belum sepenuhnya efektif dilaksanakan sehingga anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini menjadi belum digunakan secara efisien.

5. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan nilai realisasi 3,37 dengan capaian 111,96% dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan dikarenakan nilai realisasi terlalu tinggi dari target. Setelah dinormalisasikan, capaian indikator ini menjadi 110% dengan kategori Sangat Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini telah secara efektif dilaksanakan serta anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini telah digunakan secara efisien.
6. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berhasil menyelesaikan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan nilai realisasi 5 dengan capaian 100% dengan kategori capaian Baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini telah secara efektif dilaksanakan serta anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini telah digunakan secara efisien.

Berdasarkan hasil kategori capaian pada 6 indikator kinerja di atas kemudian dihitung rata-rata nilainya untuk dapat menghasilkan nilai kinerja organisasi (NKO) tahunan unit kerja. Hasil perhitungan diperoleh NKO tahunan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 sebesar 101,48% dengan predikat NKO “Istimewa”.

Penyerapan anggaran Pusakom pada tahun 2025 adalah sebesar 99,98% yaitu Rp5.220.173.240,00 (Lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp5.221.334.000,00. Pada tahun 2025 Pusakom mengalami blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebanyak Rp7.906.298.000,00. Penyerapan anggaran di atas dihitung telah mengurangi blokir anggaran tahun 2025. Apabila dihitung realisasi anggaran total, maka capaian realisasi anggaran Pusakom tahun 2025 adalah sebesar 39,76% dari pagu total senilai Rp13.127.632.000,00.

Evaluasi ketercapaian tujuan sasaran kegiatan yang dilakukan Pusakom dalam laporan kinerja tahun 2025 ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas mencatat capaian 100,56%
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal mencatat capaian 102,42%.

Capaian indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 berkisar antara 98,48% hingga 111,96%. Capaian indikator terendah

adalah indikator “Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”. Sedangkan nilai capaian indikator paling tinggi adalah “Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan” dengan nilai capaian hingga 111,96%.

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan 5 (lima) kegiatan prioritas analisis kebijakan antara lain:

1. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
2. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC
4. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
5. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025

HIGHLIGHT KINERJA

Januari



Jakarta - Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Penilaian Kinerja Organisasi Tertinggi ke-3 Tahun 2024 Kategori Unit Kerja Pusat. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ke-24

Juni

Jakarta - Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

menyelenggarakan

workshop penulisan briefing note pada tanggal 24-25 Juni 2025. Workshop ini dibuka oleh Ibu Syamsidar Thamrin, ST, MBA selaku kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, dengan pemateri Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal,

M.T., M.P.A dan Dr. Hanief Arief, S.T., M.A.P dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Workshop ini diikuti oleh 50 peserta secara luring dan daring. Diharapkan ke depan akan semakin banyak karya tulis analisis kebijakan dalam bentuk Briefing Note atau bentuk lainnya yang berkualitas yang dihasilkan oleh para analis kebijakan BPOM sebagai kontribusi nyata dalam proses kebijakan publik



Juli



Jakarta – Upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong kebijakan berbasis bukti, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggelar Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 pada 31 Juli 2025 di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM, Jakarta. Kegiatan

ini dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) dan dihadiri oleh pejabat internal BPOM, perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Indonesia.

Agustus

Makassar - Tim Pusakom berpartisipasi dalam publikasi hasil analisis kebijakan tahun 2024 pada ajang Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2025 yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) pada 30 Agustus 2025. Tema yang diusung pada PIT IAI 2025 ini adalah “*Navigating the Future of Pharmacy:*



Performance, Innovation, and Collaborative Transformations in Healthcare”. Salah satu poster ilmiah Pusakom yang berjudul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Indonesia Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu: Peran Strategis Apoteker dalam Edukasi Publik” oleh Tina Wikara berhasil meraih penghargaan *Best Poster Presentation*.

September

Surabaya - Pusakom telah berkontribusi di forum ilmiah internasional di Conference of the 9th ISoPH & 1st ICoEPH di Surabaya pada tanggal 24–25 September 2025. Tim Pusakom mempresentasikan dua karya tulis ilmiah. Salah satu karya tulis yaitu Regulatory Compliance Index of Processed Food Business Operators in Indonesia, berhasil meraih Best Poster Presentation, sebagai pengakuan atas kontribusi Pusakom dalam menghadirkan analisis kebijakan berbasis bukti untuk peningkatan mutu regulasi, perlindungan konsumen, serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat.



Bogor - Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) telah mempublikasikan hasil riset Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) melalui dua media: Pertama, dalam bentuk Poster Ilmiah di *The 3rd International Seminar of the Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology* di IPB Bogor. kedua, dalam bentuk Artikel ilmiah di *BioWeb of Conferences* (terindeks Scopus). Publikasi ini diharapkan dapat memperluas diseminasi hasil riset,

memperkuat jejaring akademik, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Jakarta- Dalam rangka penguatan advokasi dan publikasi hasil analisis Kebijakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyelenggarakan pelatihan soft skill *Public Speaking* yang diikuti oleh 47 pegawai Pusakom.



Oktober

BPOM memperkuat ekosistem pengetahuan melalui kemitraan akademik. Pada MANPENG – Magister TI Fasilkom UI, Ibu Syamsidar Thamrin berbagi pengalaman tentang penguatan siklus pengetahuan: mulai dari perumusan,



penyimpanan, berbagi, hingga pemanfaatan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti di layanan publik.

November

Surabaya - BPOM meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dengan kualifikasi Unggul, dan dinilai Istimewa dengan nilai akhir 95,40. Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN Muhammad Taufiq kepada Kepala

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Syamsidar Thamrin, mewakili Kepala BPOM Taruna Ikrar.



Prestasi ini diraih melalui persaingan ketat dengan instansi lainnya pada kategori badan/lembaga. IKK sendiri menilai kualitas kebijakan publik berdasarkan prinsip evidence-based, meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi.

Capaian ini semakin menguatkan komitmen BPOM untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jakarta - PUSAKOM telah menyelenggarakan Kegiatan Terpadu Pusat-Pusat BPOM di Auditorium Gedung Merah Putih dengan tema “Membangun Ekosistem Unggul untuk Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dan Andal Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat ekosistem pengawasan melalui kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas, percepatan transformasi digital untuk mewujudkan smart government, peningkatan mutu pengujian laboratorium, serta pemanfaatan talenta muda melalui berbagai inisiatif pembinaan SDM.



Pada kesempatan yang sama, Komisariat INAKI di BPOM resmi dikukuhkan. Prosesi pengukuhan mencakup Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala BPOM dan Penyerahan Pataka INAKI Komisariat BPOM dari Ketua Umum INAKI kepada Ketua FOKALIS (Komisariat INAKI-BPOM).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
HIGHLIGHT KINERJA	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4. ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	11
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	17
2.5. METODE PENGUKURAN.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	58
3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	64
3.4. REALISASI ANGGARAN.....	67
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1. KESIMPULAN.....	75
4.2. SARAN DAN REKOMENDASI.....	76
LAMPIRAN	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. BPOM memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, berkhasiat/manfaat, bermutu, serta berdaya saing. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan BPOM telah menetapkan visi tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM melaksanakan berbagai program pengawasan obat dan makanan serta menerbitkan peraturan, regulasi, dan keputusan terkait pengawasan dari tahap pra-pasar hingga pasca-pasar. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit pendukung pengawasan berperan memberikan rekomendasi kebijakan, keputusan, regulasi, dan program pengawasan berdasarkan data dan hasil analisis. Berbagai analisis kebijakan, seperti pemetaan data, evaluasi program, dan evaluasi kebijakan obat dan makanan, terus dilakukan untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program pengawasan. Saat ini, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berupaya meningkatkan manfaat hasil analisis melalui peningkatan kualitas, publikasi, dan advokasi kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada tahun 2025, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja Pusat Analisis Kebijakan dan akan menjadi acuan perbaikan kinerja organisasi pada periode selanjutnya. Selain itu laporan ini juga menjadi dokumen evaluasi terhadap pencapaian target kinerja perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Hasil analisis dan pencapaian kinerja dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi mencapai target kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai *scientific evidence* yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.

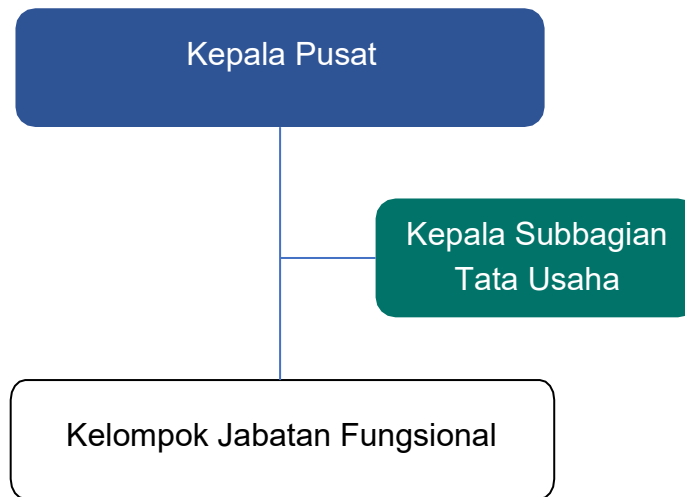
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain keenam fungsi di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

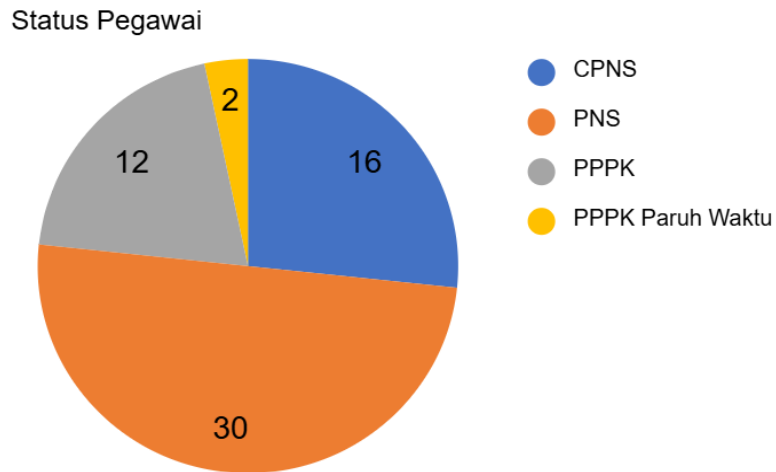
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi

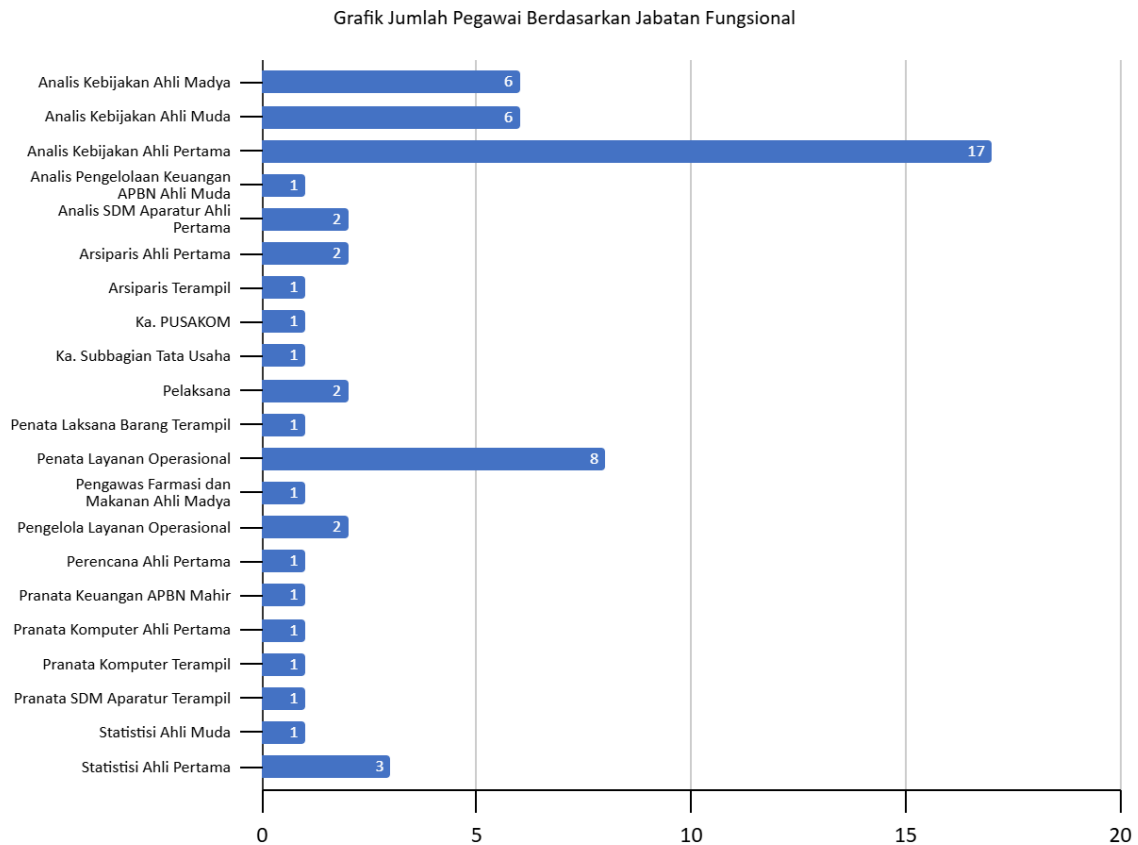
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan membagi kelompok jabatan fungsional menjadi dua fungsi besar yaitu fungsi Analisis Kebijakan yang fokus melaksanakan kegiatan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan dan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang spesifik melaksanakan kegiatan terkait penyiapan bahan pimpinan, pendampingan pimpinan dan monitoring arahan pimpinan. Dalam melaksanakan urusan administrasi non teknis, Subbagian Tata Usaha memegang peran yang cukup vital dalam menyediakan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, asset, arsip, perencanaan dan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Seluruh tim ini dikoordinasi langsung oleh Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan struktur organisasi di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki 60 ASN berdasarkan data kepegawaian per 1 Oktober 2025.



Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

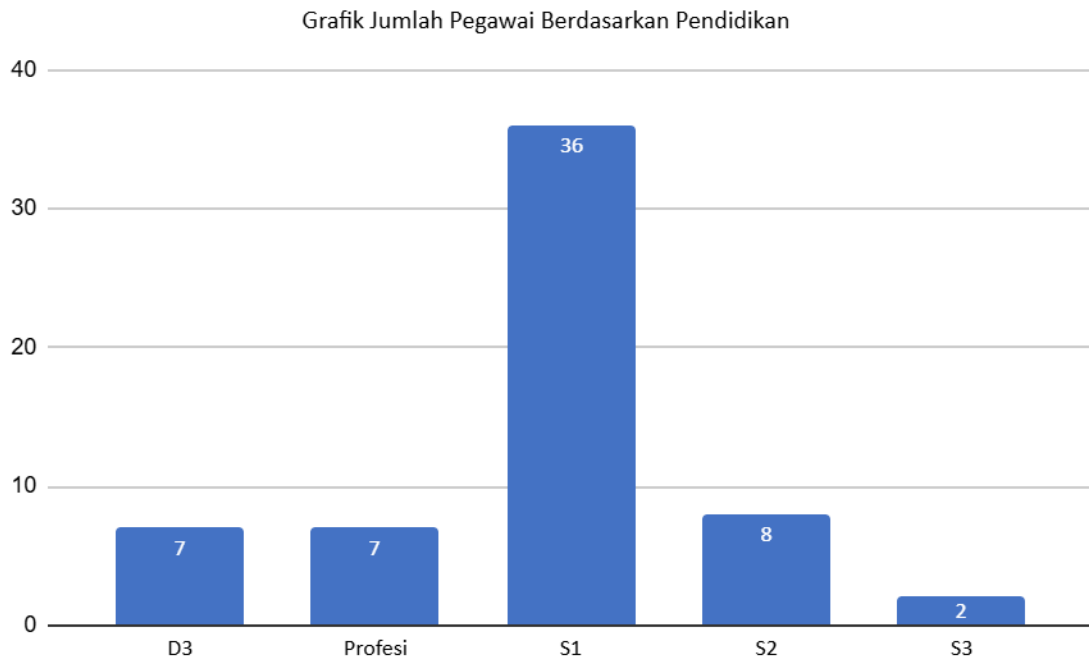
Rincian pegawai dikelompokkan berdasarkan status kepegawaian PNS sebanyak 30 orang, CPNS sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Bergabungnya CPNS dan PPPK pada bulan Juni menambah daftar sumber daya manusia baru. Kemudian pada 1 Oktober 2025 terdapat peralihan PPNNP menjadi PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memiliki jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan fungsi di satuan kerja. Berikut sebaran pegawai Pusakom berdasarkan kelompok jabatan.



Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

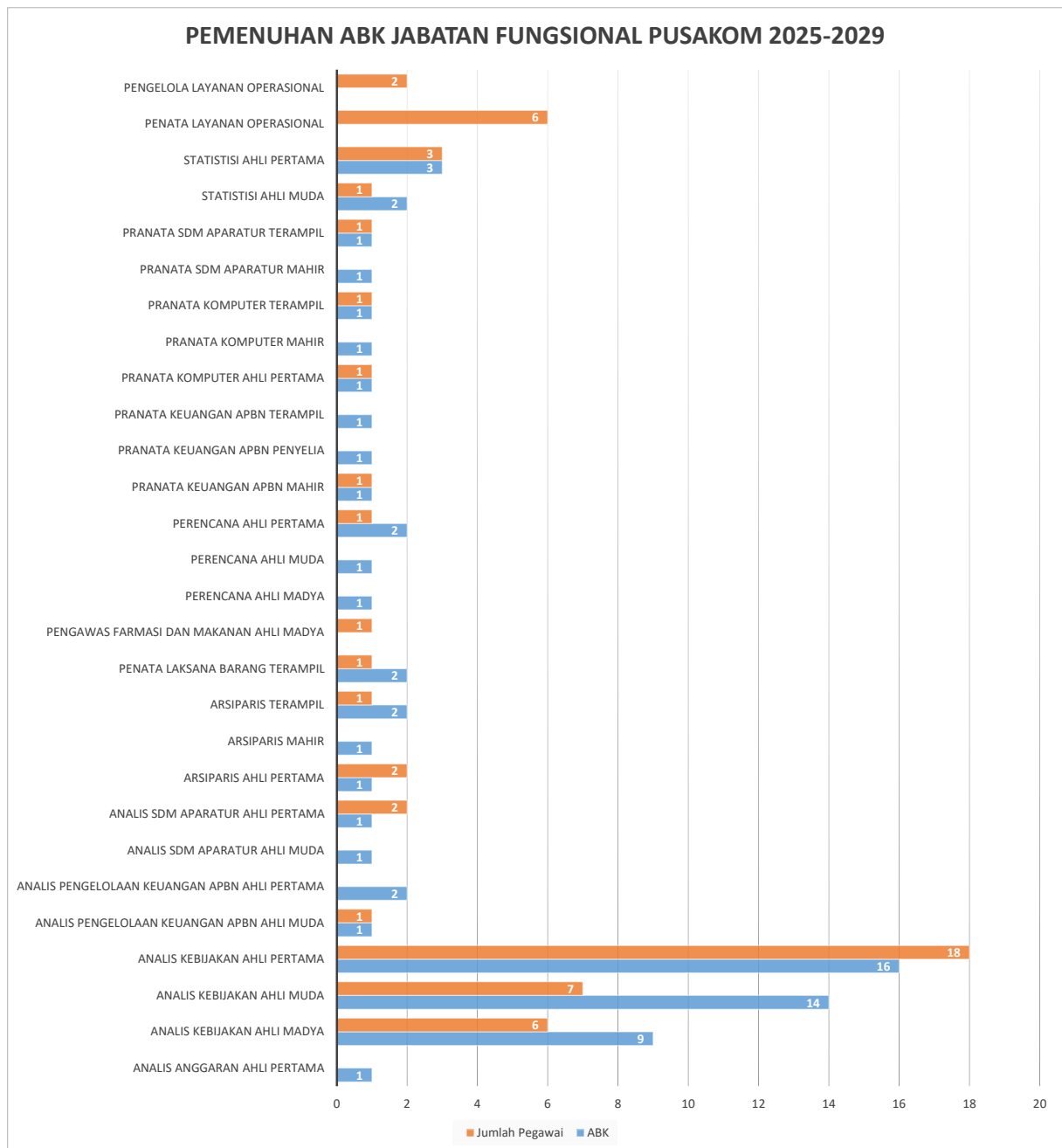
Terhitung mulai tanggal 29 September 2025, Pusakom secara resmi mempunyai Kepala Subbagian Tata Usaha. Sebelumnya jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kepala Subbagian Tata Usaha.

Dalam mendukung analisis kebijakan yang lebih berkualitas, SDM Pusakom juga memiliki beberapa pegawai dengan latar belakang pendidikan lulusan Strata-3 (S3), Strata-2 (S2), Strata-1 (S1) dan Profesi Apoteker, Diploma-III (D3). Berikut sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya.



Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, masih terdapat gap yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis kebijakan guna menyediakan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya yang tersedia saat ini, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan BPOM. Berdasarkan data di atas Pusakom masih memiliki gap pemenuhan kebutuhan SDM yang telah dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Berikut gap kebutuhan personil dan jenis jabatan Pusakom.



Gambar 4. Pemenuhan ABK Jabatan Fungsional

Berdasarkan data di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih memerlukan tambahan personil terutama pada fungsi teknis dan dukungan strategis pimpinan. Pada jabatan Analis Kebijakan untuk jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya masih memerlukan tambahan sebanyak 10 orang secara total. Kemudian pada jabatan Statistisi untuk jenjang Ahli Muda masih memerlukan tambahan 1 orang pegawai. Sedangkan dari fungsi administrasi Pusakom masih memerlukan tambahan jabatan Perencana Ahli Pertama sampai Ahli Madya sebanyak 3 orang secara total dan Arsiparis Mahir memerlukan tambahan 1 orang. Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama memerlukan tambahan 2 orang dan Pranata Keuangan APBN Terampil memerlukan tambahan 1 orang. Pemenuhan ABK Pusakom Tahun

2025 dapat dipenuhi dengan sistem perekrutan pegawai baru, mutasi, perpindahan jabatan dan/atau kenaikan jenjang jabatan.

1.4. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain:

- a. Kegiatan analisis kebijakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilakukan secara fleksibel.

Dengan dukungan teknologi digital, komunikasi daring, dan sistem manajemen mutu yang efektif, pekerjaan fleksibel tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keseimbangan kehidupan-kerja, tetapi juga membuka peluang bagi organisasi untuk mengakses talenta dari berbagai lokasi. Pendekatan ini mendorong budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan global. Terdapat kebijakan BPOM yang memberikan fleksibilitas pegawai untuk melakukan pekerjaan secara WFH/WFA dan WFO.

- b. Akses data pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan mudah sebagai input kegiatan analisis kebijakan

Ketersediaan data yang mudah diakses menjadi faktor krusial dalam mendukung kegiatan analisis yang akurat dan tepat waktu. Akses yang cepat dan terbuka terhadap data memungkinkan para analis untuk melakukan evaluasi, identifikasi tren, dan perumusan rekomendasi berbasis bukti dengan lebih efektif. Selain itu, data yang mudah diperoleh juga meminimalkan hambatan teknis dan administratif, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan kebijakan atau strategi organisasi. Dengan demikian, kemudahan akses data tidak hanya meningkatkan kualitas analisis, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga atau individu dalam menghasilkan keputusan yang relevan, responsif, dan berdampak nyata. Pusakom menggunakan data yang diakses melalui Portal SATU DATA BPOM.

- c. Belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas pada Tata Kelola Pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025, Pusakom memperoleh nilai AKIP dan nilai Pembangunan ZI yang tidak tercapai memenuhi target. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip reformasi, termasuk aspek birokrasi yang efektif, pelayanan publik yang responsif, serta akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Penurunan indeks ini dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, motivasi pegawai, serta kecepatan pencapaian target strategis organisasi.

- d. Potensi perubahan struktur organisasi dan tata kelola Pusakom menjadi bagian dalam sebuah ke deputian dapat memperkuat posisi dan memperjelas tugas pokok dan fungsi Pusakom
Restrukturisasi dilakukan untuk menciptakan alur koordinasi yang lebih efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan. Selain memperbaiki tata kelola, organisasi juga menyesuaikan budaya kerja dan pola komunikasi agar selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang. Dengan demikian, perubahan struktur organisasi menjadi bagian dari proses transformasi menuju organisasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.
- e. Tuntutan *stakeholder* semakin tinggi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya dan tepat waktu
Tuntutan terhadap kualitas rekomendasi kebijakan semakin tinggi. Stakeholder mengharapkan rekomendasi yang andal, terpercaya, dan disampaikan tepat waktu agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas analisis, pemanfaatan data dan bukti ilmiah yang komprehensif, serta koordinasi yang baik antar unit terkait. Dengan demikian, penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan stakeholder, tetapi juga mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif dan berdampak nyata.
- f. Jadwal agenda kegiatan pimpinan sangat dinamis
Agenda pimpinan yang bersifat tidak terduga atau berubah secara mendadak menjadi tantangan bagi organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional maupun strategis. Ketidakpastian ini menuntut pegawai untuk melakukan penyesuaian cepat, merubah prioritas kerja, serta mengalokasikan sumber daya secara fleksibel. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan kerja, mengganggu efektivitas koordinasi internal, dan mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi di atas, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan antisipasi di masa yang akan datang agar isu-isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menghadapi isu strategis di masa mendatang:

- a. Mengembangkan Pusakom sebagai pusat inovasi *regulatory science* bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan,

- b. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi Masyarakat,
- c. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan,
- d. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan,
- e. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang profesional,
- f. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu,
- g. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom,
- h. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman,
- i. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko sesuai pedoman,
- j. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Lima (5) Tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka memperkuat fungsi analisis kebijakan dalam mendukung kinerja pengawasan obat dan makanan.

Renstra Pusakom 2025-2029 memuat analisis lingkungan strategis; visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan; arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan kerangka pendanaan Pusakom. Berbagai aspek strategis, baik internal maupun eksternal telah dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra ini guna memastikan relevansi dan efektivitas langkah-langkah yang akan diambil selama periode Renstra 2025-2029. Selain itu, Renstra ini disusun sejalan dengan Renstra BPOM 2025-2029 yang mengacu RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra ini akan berkontribusi terhadap pencapaian Renstra BPOM dan RPJMN 2025-2029.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan BPOM Tahun 2025-2029, dirumuskan sasaran kegiatan disertai indikator kinerja yang akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Pusakom untuk 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan cascading sasaran kegiatan menggunakan *Logical Framework Approach* (LFA). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

Sasaran kegiatan yang telah disusun Pusakom tersebut akan menjadi sasaran kegiatan pada struktur cascading Renstra BPOM Tahun 2025-2029. Sasaran dan indikator kegiatan ini merupakan cascading dari sasaran strategis BPOM “Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” pada indikator kinerja program “Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dan sasaran strategis “Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima” pada indikator “Indeks RB BPOM”.

Adapun Visi BPOM 2025-2029 merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi

yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan BPOM dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sasaran kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas

dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal.

Berbagai program dan kegiatan analisis kebijakan yang dicerminkan dari dua sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja. Berikut target kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirumuskan untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Pusakom Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	86,8	87	87,5	88,0	88,5	89,0
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	90,67	91	91,3	91,6	91,9	92,2
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,29	86,5	87,0	87,5	88,0	88,5
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,58	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline (2024)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	2,96	3,01	3,10	3,15	3,20	3,25
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	5	5	5	5

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusakom Tahun 2025-2029. Penyusunan RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja (IK), dan target yang akan dicapai dalam 1 tahun. RKT disusun mengacu pada Rancangan Awal Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 yang belum disahkan oleh pimpinan unit kerja. Berikut sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang termuat dalam RKT Tahun 2025:

Tabel 2. Rencana Kinerja Pusakom Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	85,46
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,20
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,20
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	90,00

Terdapat perbedaan penetapan target kinerja pada RKT 2025 dengan PK RAPK 2025 karena terjadi penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025. Pada saat penyusunan RKT 2025 di bulan September 2024 masih mengacu pada rancangan awal Renstra Pusakom 2025-2029 dan penyusunan PK dan RAPK 2025 di bulan Februari 2025 terjadi penyesuaian penetapan target dengan pertimbangan realisasi indikator pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan pada tahun berjalan sehingga terjadi perbedaan penetapan target dengan dokumen perencanaan lain seperti Renstra, PK, dan RAPK.

Terdapat pula penambahan indikator kinerja yang masuk dalam PK RAPK 2025 yaitu indikator kinerja “Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan” sesuai kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. Alokasi anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar Rp12.757.076.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Pusakom Tahun 2025

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	248.790.000
2	DR.4135 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	8.679.845.000
3	WA.6384 – Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.828.441.000
TOTAL		12.757.076.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja.

PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk pelaksanaan PK secara terencana perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami beberapa perubahan target apabila dibandingkan dengan dokumen RKT 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian target kinerja menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dan mengakomodir tambahan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 dan Rancangan Awal Renstra Pusakom Tahun 2025-2029. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87 Persen
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91 Nilai
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5 Indeks

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dan Makanan yang Optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01 Indeks
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5 Indeks

Perjanjian kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali sepanjang tahun 2025. Revisi pertama pada tanggal 3 Maret 2025 dikarenakan pergantian pimpinan unit kerja. Revisi kedua pada tanggal 29 Agustus 2025 dikarenakan penambahan alokasi anggaran pada kegiatan WA.6384 – Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM pada komponen Gaji dan Tunjangan untuk penambahan pegawai CPNS 2025.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan *exercise* penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja Pusakom tahun 2025.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusakom Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (ribu Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	-	-	-	87	7.769.657

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (ribu Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Olahan yang Dimanfaatkan					
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91	91	91	91	753.610
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	86,5	188.330
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	82	35.640
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	3,01	240.820
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	5	3.985.019
TOTAL						12.757.076

Pada akhir triwulan I 2025 terjadi pergantian pimpinan unit kerja maka dokumen RAPK mengalami perubahan pertama sekaligus pada dokumen PK. Kemudian pada triwulan II terjadi perubahan kedua RAPK pada alokasi anggaran yaitu penambahan anggaran sebesar Rp351.556.000,00 untuk kegiatan layanan perkantoran pada gaji dan tunjangan dikarenakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendapatkan tambahan pegawai baru

dari sumber CPNS dan PPPK. Selain itu juga dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada seluruh kegiatan yang secara rinci termuat dalam tabel 6.

Tabel 6. Perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusakom Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (ribu Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	-	-	-	87	7.585.285
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91	91	91	91	810.746
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	86,5	442.311
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	82	59.201
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	3,01	30.228
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis	-	-	-	5	4.180.861

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (ribu Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Kebijakan Obat dan Makanan					
TOTAL						13.108.632

2.5. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

A. Persentase Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Pengukuran pemanfaatan hasil analisis kebijakan diukur menggunakan survei dengan skala likert 1-5 dengan parameter pengukuran:

1. Relevansi hasil analisis kebijakan/rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan (bobot 40%)
2. Aktualitas hasil analisis/rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan (bobot 20%)
3. Kuantitas data hasil analisis/rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan (bobot 30%)
4. Daya menginspirasi hasil analisis/rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi inspirasi unit kerja dalam menghasilkan kegiatan baru (bobot 10%)

Responden yang menjadi target survei adalah unit kerja BPOM yang meminta, memanfaatkan dan terkait dengan topik analisis kebijakan yang dihasilkan pada tahun N-1.

Nilai Kemanfaatan hasil analisis kebijakan dihitung dengan rumus:

Persentase kemanfaatan = (rata-rata nilai relevansi x 40%) + (rata-rata nilai aktualitas x 20%) + (rata-rata nilai kuantitas x 30%) + rata-rata nilai menginspirasi x 10%)

B. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan.

Indikator ini dinyatakan dalam hasil penilaian survei oleh responden (skala 1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot 25 dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

0,00- 25,00 = sangat kurang
25,01-50,00 = kurang
50,01-75,00 = baik
75,01-100,00 = sangat baik

C. Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan reviu oleh Auditor Internal serta Tim Penilai Inspektorat Utama.

Tabel 7. Komponen Pengungkit dan Hasil Indeks Pembangunan ZI

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

D. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Indikator nilai AKIP Pusakom dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi 4 (empat) komponen penilaian, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;

- (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 8. Bobot Penilaian Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24%
2	Pengukuran Kinerja	24%
3	Pelaporan Kinerja	12%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%
5	Capaian Kinerja	20%
Nilai Hasil Evaluasi		100%

- E. Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 9. Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai	Keterangan
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>

Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai	Keterangan
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas sebagai berikut

Skor Maturitas = Skor Total : 16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko,
- Skor total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

F. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Cara Perhitungan:

$NKA = (Nilai\ EKA \times 50\%) + (Nilai\ IKPA \times 50\%)$

Nilai Kinerja Anggaran kemudian dikonversi menjadi kategori nilai 1 sampai dengan 5. Berikut ini konversi kategori penilaian sesuai PMK 63/2023:

Tabel 10. Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi
0-50	Sangat Kurang	1
>50-60	Kurang	2
>60-80	Cukup	3
>80-90	Baik	4
>90-100	Sangat Baik	5

Kesimpulan dari capaian masing-masing indikator kinerja dapat dinyatakan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 11. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Sedangkan kesimpulan predikat terkait nilai kinerja organisasi (NKO) dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat	Capaian IK	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai pada tahun 2025 dan diuraikan pada bagian capaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja sebagai berikut.

A. Capaian Indikator Kinerja

Sepanjang tahun 2025, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) telah melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* internal BPOM untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan. Dalam rangka menghasilkan *output* tersebut, Pusakom telah melaksanakan proses penyusunan analisis kebijakan. Kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Setiap kegiatan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang diukur keberhasilannya. Pada tahun 2025 ini Pusakom telah melakukan pengukuran pada 6 indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut realisasi dan capaian indikator kinerja Pusakom tahun 2025:

Tabel 13. Matriks Nilai Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87	87,32	100,37%	100,37%	0%	100,37%
2		Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91	91,69	100,76%	100,76%	0%	100,76%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	85,86	99,26%	99,26%	0%	99,26%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	Capaian	Normalisa si Capaian PK	Koreksi Normali sasi Capaian PK Berdas arkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
4	Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	80,75	98,48%	98,48%	0%	98,48%
5		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	3,37	111,96%	110%	0%	110%
6		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	100%	100%	0%	100%
Total Capaian PK								608,87%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								101,48%
Predikat NKO								Istimewa

Berdasarkan tabel 13, realisasi dan capaian kinerja di atas diperoleh informasi bahwa terdapat 2 indikator kinerja yang capaian realisasinya memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik, 3 indikator kinerja dengan capaian kategori baik, dan 1 indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian melebihi batas normal (110%) capaian yang diperoleh yaitu 111,96% kemudian dinormalisasi capaian menjadi 110%. Dari data capaian di atas kemudian dilakukan kesimpulan 3 indikator kinerja berhasil dicapai dan 2 indikator kinerja gagal dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, maka dalam perhitungan NKO tidak mendapat koreksi predikat AKIP alias koreksi 0%.

Hasil perhitungan NKO tahunan diperoleh nilai akhir capaian PK Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2025 adalah sebesar 101,48% dengan predikat Istimewa.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis yang akan disajikan pada bagian ini meliputi perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2025 serta target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun sebelumnya, membandingkan capaian dengan capaian unit kerja lain yang sejenis, analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan capaian, dan analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, serta upaya peningkatan kinerja. Berikut analisis akuntabilitas kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2025 untuk setiap indikator kinerja.

1) Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target tahunan untuk indikator ini adalah sebesar 87%. Pengukuran rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dilakukan berdasarkan survei kepada responden yang merupakan unit kerja peminta atau pemanfaat hasil analisis kebijakan. Parameter penilaian antara lain, kemanfaatan analisis untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses bisnis internal, dan landasan kegiatan berikutnya. Berikut capaian indikator kinerja bila dibandingkan dengan target tahunannya.

Tabel 14. Realisasi Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87	87,32	100,37	Sangat Baik

Pengukuran indikator ini didasarkan atas hasil analisis kebijakan obat dan makanan yang dihasilkan pada kegiatan tahun anggaran 2024 (n-1). Apabila dibandingkan dengan target tahunannya, realisasi indikator ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator ini dari tahun 2020-2024. Berikut perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun 2020-2024.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
1 Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2020	72	72,60	100,83	Sangat Baik
2021	75	78,66	104,88	Sangat Baik
2022	78	78,86	101,1	Sangat Baik
2023	80	83,97	104,96	Sangat Baik
2024	84,5	86,80	102,73	Sangat Baik
2025	87	87,32	100,37	Sangat Baik

Dari sisi realisasi dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 0,52% dari tahun 2024. Tren realisasi indikator ini selalu meningkat dari tahun 2020. Dari sisi capaian, capaian tahun 2023 ini merupakan persentase capaian tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan pencapaian indikator ini selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kemanfaatan hasil analisis kebijakan dari tahun baseline 2020 sebesar 72,60 menjadi 87,32 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan Pusakom dalam meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan berhasil dilakukan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- Pencapaian indikator ini perlu dibandingkan juga dengan target jangka menengah. Target jangka menengah yang akan diperbandingkan dapat mengacu pada dokumen yaitu dokumen Renstra Pusakom Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan realisasi indikator ini dengan target Renstra.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	89	87,32	98,11	 Akan Tercapai

Apabila ditinjau dari pencapaian indikator ini terhadap target jangka menengah, dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 akan tercapai target tahun 2029. Dari target 89 di akhir periode Renstra akan dapat dicapai realisasinya perlu peningkatan diseminasi dan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk mencapai kekurangan target yaitu 1,68. Dengan capaian ini maka program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator yang telah direncanakan pada dokumen renstra menjadi relevan untuk dilaksanakan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Indikator ini merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Pusakom BPOM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja sejenis. Kami telah melakukan *benchmarking* ke satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yaitu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK Menkes) yang menggunakan indikator kinerja “Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman”. Sedangkan satker di bawahnya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 17. Penggunaan KPI unit kerja sejenis dengan Pusakom

Nama Unit Kerja	Indikator Kinerja
Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Persentase Keputusan atau peraturan yang disusun berbasis kajian dan bukti
Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Keputusan atau peraturan yang disusun berbasis kajian dan bukti
Pusat Kebijakan	Persentase Keputusan atau peraturan

Nama Unit Kerja	Indikator Kinerja
Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	yang disusun berbasis kajian dan bukti

Berdasarkan hasil *benchmark* di atas kami memperoleh informasi bahwa indikator kinerja yang digunakan pada satker di Kementerian Kesehatan di atas belum dapat dibandingkan dengan indikator kinerja Pusakom karena aspek yang diukur dan cara pengukurannya berbeda. Saat ini kami masih belum menemukan satuan kerja lain yang menggunakan indikator yang sama dengan yang digunakan oleh Pusakom.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah meningkatnya frekuensi publikasi Internasional Hasil Analisis Kebijakan pada berbagai forum seminar di tingkat nasional maupun internasional. Publikasi jurnal pada situs jurnal internasional dan keterlibatan pakar ahli dalam penyusunan analisis kebijakan juga berperan dalam peningkatan kemanfaatan hasil analisis kebijakan. Keterlibatan pakar ini telah meningkatkan kualitas dan validitas hasil analisis kebijakan sehingga *stakeholder* pemanfaat hasil lebih percaya sepenuhnya dengan hasil analisis kebijakan Pusakom, peningkatan positif terhadap *feedback* pemanfaat hasil analisis kebijakan mencerminkan kepuasan pelanggan atas hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pusakom.

Upaya penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan dimasa mendatang antara lain meningkatkan koordinasi lintas unit kerja untuk menjaring kebutuhan analisis kebijakan di bidang obat dan makanan. Menjamin ketepatan waktu penyampaian hasil analisis kebijakan kepada *stakeholder* pemanfaat sesuai dengan standar layanan Pusakom. Membentuk tim analisis kebijakan lintas unit kerja sesuai dengan topik analisis kebijakan yang telah direncanakan sebagai bentuk keterlibatan *stakeholder* pemanfaat untuk memastikan substansi yang dibutuhkan dalam analisis kebijakan dapat tertangkap sehingga konten rekomendasi hasil analisis kebijakan dapat tersaji sesuai kebutuhan. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan terangkum pada matriks berikut ini:

Tabel 18. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Melaksanakan kegiatan analisis kebijakan sehingga memberikan hasil dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan	-Mengadakan Forum Konsultasi dalam rangka mematangkan konsep analisis kebijakan Obat dan Makanan untuk tahun berikutnya bersama pimpinan BPOM, narasumber, dan <i>stakeholder</i> -Mengadakan pengembangan kompetensi SDM	- Melaksanakan Forum Konsultasi dalam rangka mematangkan konsep analisis kebijakan Obat dan Makanan untuk tahun berikutnya bersama pimpinan BPOM, narasumber, dan <i>stakeholder</i> - Melaksanakan pengembangan kompetensi JF Analisis Kebijakan dan Statistisi	TW III 2026	Y	S-01	Penurunan kualitas hasil analisis dan rekomendasi kebijakan
2	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Melakukan analisis kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>	Melakukan finalisasi dan pelaporan hasil analisis kebijakan tahun 2025	Melakukan finalisasi dan pelaporan hasil analisis kebijakan tahun 2025	TW IV	Y	O-01	Pelaksanaan analisis kebijakan yang tidak sesuai dengan timeline
3	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan			1. Melakukan koordinasi dengan unit pengusul secara berkala untuk menyampai	TW I 2026	Y	S-02	Penambahan dan/atau perubahan judul analisis kebijakan

				kan/memb ahas progres pelaksanaa n analisis kebijakan 2. Melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menyepaka ti perubahan topik atau cakupan analisis kebijakan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Forum diseminasi hasil analisis kebijakan adalah kegiatan yang berisi seminar pemaparan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* internal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan dihadiri juga oleh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BPOM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh *stakeholder* yang akan memanfaatkan hasil analisis kebijakan dapat terpapar secara langsung atas informasi dan data yang tersaji. harapan dari hasil analisis kebijakan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat.

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pusakom
Kegiatan ini ditujukan untuk memutakhirkan *platform* sistem informasi hasil analisis kebijakan agar mudah untuk diakses oleh berbagai kalangan yang akan meningkatkan peluang pemanfaatan eksternal dari hasil analisis kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan tahun 2025
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berproses melaksanakan topik analisis kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- I. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025
- II. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
- III. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
- IV. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC)
- V. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025

2) Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Target tahunan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 91. Realisasi indikator ini diukur dengan menggunakan survei kepada *stakeholder* yang menerima layanan koordinasi penyiapan bahan, pendampingan kegiatan, dan pemantauan tindak lanjut arahan Pimpinan selama tahun 2025. Berikut perbandingan target dan realisasi indikator ini.

Tabel 19. Realisasi Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91	91,69	100,76	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahunan telah dapat tercapai dengan capaian 100,76% dengan kategori sangat baik. Pelaksanaan survei ini dilakukan setiap bulan dan terus berjalan sepanjang tahun setelah kegiatan koordinasi telah selesai, kemudian nilai diakumulasi setiap triwulan.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Fungsi dukungan strategis pimpinan berada di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sejak tahun 2023. Sebelumnya fungsi ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Realisasi tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya walaupun fungsinya dijalankan oleh unit kerja yang berbeda. Berikut perbandingan realisasi indikator ini tahun 2020-2025:

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
2 Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2020	75	85,37	113,83	Sangat Baik
2021	83,1	84,41	101,85	Sangat Baik
2022	83,5	90,02	107,81	Sangat Baik
2023	84	87,96	104,71	Sangat Baik
2024	89	90,67	101,87	Sangat Baik
2025	91	91,69	100,76	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai realisasi indikator ini dari tahun 2020-2025 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan. Dari sisi capaian kinerja dari tahun 2020-2025 juga mengalami fluktuasi yang sama turun dan naik. Fluktuasi ini disebabkan karena metode pengukuran indikator ini dilakukan dengan survei, sehingga *feedback stakeholder* yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan tidak dapat diperkirakan sesuai tingkat kepuasan masing-masing. Kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir nilai realisasi meningkat secara konsisten.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- Target jangka menengah yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2029 adalah sebesar 92,2. Target ini tertuang dalam dokumen Renstra Pusakom Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan realisasi dengan target jangka menengah untuk indikator ini

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	92,2	91,69	99,44	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk tahun 2029 akan dapat dicapai di tahun 2029 dengan capaian 99,44%. Maka masih diperlukan upaya untuk menjaga kualitas layanan koordinasi agar lebih efektif dan berhasil untuk meningkatkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Indikator ini merupakan indikator yang spesifik hanya dimiliki oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja sejenis

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan ini diperoleh dari hasil survei terhadap *stakeholder* Pusakom yang telah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kepala Badan POM dan dalam proses penyelenggaraannya melibatkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam penyiapan dan pendampingan substansi kepala Badan dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala BPOM. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah tingkat koordinasi yang intensif dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam menyiapkan bahan pimpinan, pendampingan kegiatan pimpinan yang diselenggarakan unit kerja lain, dan penyampaian notula yang disampaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat setelah pelaksanaan kegiatan bersama pimpinan. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan terangkum pada matriks berikut ini:

Tabel 22. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Substansi pada layanan dukungan strategis pimpinan masih perlu pengayaan	Tim DSP dilibatkan dalam kegiatan analisis kebijakan dan sebaliknya Tim kegiatan analisis kebijakan juga dapat dilibatkan dalam menyusun bahan pimpinan. Harapannya hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh PUSAKOM dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan substansi pimpinan	1. Melaksanakan pendampingan dan penyiapan bahan sesuai agenda dan melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik 2. Memberikan penugasan silang antara tim DSP dan Tim analisis kebijakan	TW I 2026	Y	O-02, O-03	Kualitas bahan substansi Kepala BPOM tidak optimal, Terdapat arahan Kepala BPOM yang tidak masuk dalam daftar pemantauan pada aplikasi Sinergis

- f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

Salah satu tugas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan (DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota.

Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pendokumentasian tindak lanjut arahan dan kebijakan Pimpinan selain dari kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan, juga berasal dari disposisi tertulis. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Pimpinan Badan POM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draf bahan dari unit kerja terkait

3) Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Target Indeks Pembangunan ZI Pusakom tahun 2025 yang termuat dalam perjanjian kinerja adalah senilai 86,5. Berikut tabel realisasi indeks pembangunan ZI dibandingkan dengan target tahunannya

Tabel 23. Realisasi Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	85,86	99,26	Baik

Realisasi indeks pembangunan ZI Pusakom tahun 2025 yaitu sebesar 85,86 masih lebih rendah dari target 86,5 tahun 2025. Pusakom hanya mampu mencapai 99,26% dari target tahun 2025. Nilai indeks ini merupakan hasil penilaian yang bersumber dari lembar kerja evaluasi zona integritas yang diassesment oleh

Inspektorat BPOM. Dengan adanya gap realisasi ini, maka perlu dilakukan upaya lebih untuk memperbaiki kualitas kinerja.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Indeks ini merupakan indikator yang telah dimiliki Pusakom sejak periode Renstra tahun 2020-2024, dahulu nomenklatur untuk indeks pembangunan ZI adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Capaian indikator ini terus diukur dengan periode tahunan sehingga ketercapaiannya dapat dibandingkan dari tahun 2020-2025. Berikut disajikan capaian indeks Pembangunan ZI tahun 2020- 2025.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
3 Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2020	88	73,11	83,08	Cukup
2021	81,7	81,74	100,05	Sangat Baik
2022	85,2	87,17	102,31	Sangat Baik
2023	88,7	87,55	98,70	Baik
2024	92,2	86,29	93,59	Baik
2025	86,5	85,86	99,26	Baik

Berdasarkan perbandingan realisasi di atas, terdapat penurunan nilai realisasi dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini patut diperhatikan oleh Pusakom dalam pelaksanaan RB di unit kerja mengingat terdapat penurunan target pada tahun 2025 namun tetap tidak tercapai kinerjanya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
Target indeks pembangunan ZI pada tahun 2029 adalah sebesar 88,5 dengan realisasi indeks Pembangunan ZI 85,86. Berikut perbandingan realisasi indeks pembangunan ZI tahun 2025 dengan target jangka menengahnya.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,5	85,86	97,01	 Akan Tercapai

Berdasarkan sandingan di atas dapat diketahui bahwa Pusakom belum dapat mencapai target indeks pembangunan ZI jangka menengah. Gap realisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 2,64 poin. Hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi yang telah direncanakan pada periode Renstra 2025-2029 masih perlu tindakan lebih optimal dalam upaya meningkatkan indeks Pembangunan ZI Pusakom.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Indeks pembangunan ZI merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPOM. Pusakom yang merupakan satuan kerja mandiri yang dapat membandingkan capaian indeks pembangunan ZI dengan sesama unit kerja di lingkungan BPOM. Berikut perbandingan realisasi dan capaian indeks pembangunan ZI tahun 2025 di Pusat-Pusat.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan Unit Kerja Lain

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,5	85,86	97,01	Baik 
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,52	86,60	100,09	Sangat Baik 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM	88,5	88,69	100,21	Sangat Baik

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
				
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91,59	91,66	100,08	Sangat Baik 

Berdasarkan sandingan data di atas dari sisi capaian kinerja Pusakom memiliki capaian paling rendah apabila dibandingkan dengan unit kerja Pusat-pusat BPOM. PPSDM POM mencatatkan capaian yang lebih tinggi dari target kinerjanya, diikuti Pusdatin dan PPPOMN dapat mencapai target yang ditetapkan, hanya Pusakom yang tidak tercapai targetnya. Dari sisi realisasi indeks RB Pusakom juga mencatatkan realisasi yang lebih rendah dibanding ketiga unit pusat lainnya. Dengan posisi ini Pusakom harus berupaya untuk terus meningkatkan nilai pembangunan ZI supaya dapat mencapai target.

e. Analisis penyebab kegagalan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah

- Mekanisme pembentukan tim pembangunan RB belum dilengkapi kriteria pengukuran yang jelas;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI belum didokumentasikan setiap bulan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ZI belum dilengkapi bukti tindak lanjut;
- Laporan pelaksanaan rencana aksi agen perubahan belum mengukur dampak perubahan dari rencana aksi;
- Penggunaan subsite resmi pom.go.id sesuai tugas dan fungsi unit kerja belum dapat menggambarkan inovasi unit kerja;
- Perubahan subsite resmi belum terdokumentasi pada monitoring penggunaan teknologi informasi;
- Belum tersedia fasilitas pengaduan yang terhubung langsung ke Kepala Unit Kerja;
- Belum dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan;
- Jumlah layanan belum sesuai standar layanan dan belum terdapat pengukuran kemudahan dari layanan publik yang diberikan.

Upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indeks pembangunan ZI ini antara lain:

- Melengkapi mekanisme pembentukan tim pembangunan RB dengan kriteria pengukuran yang jelas;
- Mendokumentasikan kegiatan pembangunan ZI setiap bulan;
- Melengkapi laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ZI dengan bukti tindak lanjut;
- Melakukan pengukuran dampak atas rencana aksi agen perubahan;
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut;
- Melaporkan perubahan subsite resmi pada monitoring penggunaan teknologi informasi;
- Memfasilitasi saluran pelaporan pengaduan yang terhubung langsung ke Kepala Unit Kerja;
- Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan dan menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil survei kepuasan pelanggan;
- Melakukan pengukuran kemudahan dari layanan publik yang diberikan dan menyesuaikan jumlah layanan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan;
- Meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran;
- Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan terangkum pada matriks berikut ini:

Tabel 27. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Rencana kerja pembangunan ZI dan implementasinya belum menghasilkan inovasi yang signifikan	-Melakukan identifikasi kekurangan implementasi pembangunan ZI di Pusakom berdasarkan hasil penilaian 2025 dan -Memasukkan tindakan perbaikan pada rencana kerja pembangunan ZI tahun 2026 - Melaksanakan rencana aksi pembangunan ZI TW I 2026 dan monitoring progress rencana aksi TW I pada seluruh kelompok kerja	-Melakukan identifikasi kekurangan implementasi pembangunan ZI di Pusakom berdasarkan hasil penilaian 2025 dan - Memasukkan tindakan perbaikan pada rencana kerja pembangunan ZI tahun 2026 - Melaksanakan rencana aksi pembangunan ZI TW I 2026 dan monitoring progress rencana aksi TW I pada seluruh kelompok kerja	TW I 2026	Y	S-05	Penurunan realisasi dan capaian indeks pembangunan ZI PUSAKOM

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Belum seluruh SDM PUSAKOM memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	1. Melakukan reviu dan updating gap kompetensi SDM 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi 3. Melaksanakan pengembangan kompetensi 4. Mengevaluasi hasil pengembangan kompetensi (melakukan updating data kompetensi)	1. Melakukan reviu dan updating gap kompetensi SDM 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi 3. Melaksanakan pengembangan kompetensi 4. Mengevaluasi hasil pengembangan kompetensi.	TW I 2026	Y	SDM-01	Kinerja SDM kurang optimal

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB Pusakom pada tahun 2025 telah menyusun rencana aksi implementasi RB untuk masing masing area perubahan. Dalam rangka memastikan rencana aksi RB dapat berjalan dengan lancar Pusakom secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB setiap triwulan

Penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025 pada setiap area perubahan berdasarkan hasil pelaksanaan rencana aksi RB tahun 2025. Selanjutnya lembar kerja evaluasi ini akan menjadi dasar penilaian Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan rencana aksi agen perubahan
Pusakom tahun 2025 ini melaksanakan beberapa rencana aksi
AOC guna mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai
nilai reformasi birokrasi.

Pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai Reformasi Birokrasi
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan seluruh
rencana aksi pembangunan ZI tahun 2025 oleh seluruh
kelompok kerja. Selain itu juga dilakukan *sharing session*
implementasi RB oleh setiap pokja, kemudian kelompok kerja
lain memberikan masukan perbaikan rencana aksi RB. Dengan
pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh kelompok kerja RB
dapat mendapatkan ide rencana aksi yang lebih tajam dan tepat
sasaran dalam rangka meningkatkan implementasi
pembangunan ZI di Pusakom.

4) Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Target kinerja nilai AKIP tahun 2025 dalam dokumen perjanjian
kinerja tahun Pusakom adalah 82. Perhitungan realisasi nilai
AKIP ini diukur berdasarkan *assessment* atas lembar kerja
evaluasi SAKIP yang disusun oleh unit kerja dan dinilai oleh
Inspektorat Utama BPOM. Berikut perbandingan realisasi
dengan target tahunan indikator ini.

Tabel 28. Realisasi Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	80,75	98,48	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi nilai AKIP
tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi
indikator ini 80,75 dengan capaian sebesar 98,48% dengan
kategori baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja nilai AKIP Pusakom
tahun 2020-2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2020	80	75,06	93,81	Baik
2021	76,6	75,1	98,04	Baik
2022	78,1	80,475	103,04	Sangat Baik
2023	79,6	80,61	101,27	Sangat Baik
2024	82,76	81,58	98,57	Baik
2025	82	80,75	98,48	Baik

Berdasarkan perbandingan realisasi di atas, nilai AKIP dari tahun 2020-2024 terjadi tren meningkat namun belum dapat mencapai target 2024. Pada tahun 2025 terjadi penurunan target 82 namun tetap tidak dapat mencapai target dikarenakan terdapat komponen penilaian AKIP yaitu capaian kinerja yang tidak tercapai pada target PK 2024.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
Target kinerja Nilai AKIP untuk periode tahun 2029 adalah 84. Target ini tertuang dalam dokumen Renstra Pusakom Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	84	80,75	96,13	 Akan Tercapai

Berdasarkan sandingan di atas dapat diketahui bahwa Pusakom belum dapat mencapai target nilai AKIP jangka menengah. Gap realisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 3,25 poin. Hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi yang telah direncanakan pada periode Renstra 2025-2029 masih perlu tindakan lebih optimal dalam upaya meningkatkan nilai AKIP Pusakom.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Nilai AKIP ini juga merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM. Pusakom dapat membandingkan capaian kinerja dengan unit kerja pusat-pusat lain di BPOM. Berikut sandingan data capaian Nilai AKIP pada unit kerja pusat-pusat.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 dengan Unit Kerja Lain

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	80,75	98,48	Baik 
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,88	80,11	97,83	Baik 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM	80,15	78,19	97,55	Baik 
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	85	80,47	94,67	Baik 

Berdasarkan perbandingan di atas secara nilai realisasi Pusakom merupakan nilai paling tinggi 80,75 dari Pusat-pusat, kemudian diikuti PPPOMN dengan nilai 80,47. Sedangkan secara capaian Pusat Analisis Kebijakan paling tinggi mencapai 98,48 diikuti Pusatin dengan capaian 97,83.

Secara keseluruhan capaian AKIP di Pusat-pusat tidak tercapai target seluruhnya dan mendapatkan kategori capaian baik.

- e. Analisis penyebab kegagalan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan telah disusun namun masih terdapat kelemahan berupa tidak adanya kertas kerja penetapan target tahun 2025-2029 dan masih terdapat

ketidaksesuaian pencantuman target dalam beberapa dokumen perencanaan

- Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025 telah dipublikasikan pada subsite ESR Menpan, namun belum berdasarkan PK dan RAPK Tahun 2025 terkini
- Belum dilakukan penyesuaian target pada SKP Kepala Unit terkait Indikator Kinerja direktif “Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Tahun 2025” sesuai dengan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor BKP. 09.01.24.05.25.266 tanggal 06 Mei 2025.
- Terdapat pedoman tata cara pengumpulan data kinerja, namun saat pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Utama, SOP Mikro masih berupa draft dan belum sesuai kriteria dan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada SIMETRIS masih belum dilakukan secara tertib setiap bulan
- Terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan Aplikasi SIMETRIS
- Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan data kinerja secara lengkap
- Penyajian laporan evaluasi internal belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman SAKIP dan matriks rekomendasi dan RTL yang disajikan setiap triwulan belum berkesinambungan.
- Capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023

Upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP di masa yang akan datang antara lain:

- Menyusun kelengkapan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman SAKIP
- Mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite unit kerja dan e-SAKIP REVIU
- Memastikan keselarasan dan validitas sumber data kinerja untuk memastikan data kinerja yang dilaporkan pada seluruh platform pelaporan kinerja dapat sama dan valid.
- Menyusun laporan kinerja dan laporan evaluasi internal sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM

Tabel 31. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Terdapat dokumen laporan yang diselesaikan tidak sesuai <i>timeline</i>	Diperhatikan jangka waktu pengumpulan laporan agar tidak mengurangi penilaian	-Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 -Menyusun Laporan Tahunan 2025 - Menyusun Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV sesuai timeline	TW I 2026	Y	S-06	Penurunan capaian nilai AKIP PUSAKOM
2	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Perencanaan dan kinerja PUSAKOM yang dijelaskan dalam laporan kinerja belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pedoman SAKIP BPOM	1. Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional perencana 2. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara berkala 3. Membentuk SK Tim SAKIP 4. Mengikuti bimtek penyusunan Lapkin 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian AKIP	1. Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional perencana 2. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara berkala 3. Membentuk SK Tim SAKIP 4. Mengikuti bimtek penyusunan Lapkin 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian AKIP	TW I 2026	Y	S-06	Penurunan capaian nilai AKIP PUSAKOM

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- Pelaksanaan evaluasi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- Penyusunan dokumen perencanaan, monitoring evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja Pusakom
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025.

5) Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Target kinerja indeks manajemen risiko Pusakom tahun 2025 dalam dokumen perjanjian kinerja tahun Pusakom adalah 3,01. Perhitungan realisasi tingkat maturitas penerapan manajemen risiko ini diukur berdasarkan assessment atas lembar kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang disusun oleh unit kerja dan dinilai oleh Inspektorat Utama BPOM. Berikut perbandingan realisasi dengan target tahunan indikator ini.

Tabel 32. Realisasi Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	3,37	111,96	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi nilai maturitas manajemen risiko tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Realisasi indikator ini 3,37 dengan capaian sebesar 111,96% dengan kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian melebihi batas normal yaitu 110% berdasarkan Kepka 676/2025 tentang pedoman SAKIP BPOM.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat dikategorikan *Risk Defined*.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tingkat maturitas manajemen risiko Pusakom tahun 2021-2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2021	-	2,781	-	-
2022	-	2,781	-	
2023	-	2,844	-	
2024	-	2,969	-	-
2025	3,01	3,37	111,96	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan perbandingan realisasi tingkat maturitas manajemen risiko Pusakom dari tahun 2021-2025 terlihat indikator ini baru dimasukkan ke dalam indikator kinerja pada tahun 2025 maka target kinerja baru muncul pada tahun 2025. Tahun sebelumnya tingkat maturitas diukur nilainya tetapi tidak dimasukkan ke dalam indikator kinerja. Secara tren nilai maturitas manajemen risiko Pusakom mengalami peningkatan secara konsisten. Realisasi tahun 2025 sangat tinggi sampai capaian melebihi 110% karena hampir seluruh rekomendasi dari Inspektorat Utama telah ditindak lanjuti dengan baik.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
Target kinerja tingkat maturitas manajemen risiko untuk periode tahun 2029 adalah 3,25. Target ini tertuang dalam dokumen Renstra Pusakom tahun 2025-2029. Berikut perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis	3,25	3,37	111,96	

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Kebijakan Obat dan Makanan				Melampaui

Berdasarkan sandingan di atas dapat diketahui bahwa Pusakom telah mencapai target indeks manajemen risiko jangka menengah. Hal ini merupakan indikasi bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah mencapai titik tertinggi yang telah direncanakan pada periode Renstra 2025-2029 maka perlu penyesuaian target baru untuk Pusakom.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Tingkat maturitas manajemen risiko merupakan indikator kinerja baru yang dimiliki oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM. Pusakom dapat membandingkan capaian kinerja dengan unit kerja pusat-pusat lain di BPOM. Berikut sandingan data capaian indeks manajemen risiko pada unit kerja pusat-pusat.

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 dengan Unit Kerja Lain

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	3,37	111,96	Tidak dapat disimpulkan 
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2,94	2,96	100,68	Sangat Baik 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM	3,05	3,00	98,36	Baik 
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,15	2,938	93,27	Baik 

Berdasarkan perbandingan di atas secara nilai realisasi Pusakom merupakan nilai paling tinggi 3,37 dari Pusat-pusat, kemudian diikuti PPSDM POM dengan nilai 3,00. Sedangkan secara capaian

Pusat Analisis Kebijakan paling tinggi mencapai 111,96 diikuti Pusdatin dengan capaian 100,68.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
Faktor yang membuat keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi manajemen risiko dari Inspektorat dengan baik dan tepat. Rekomendasi upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 36. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Aktivitas pengendalian risiko dan dokumen risiko belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan	Menyusun daftar risiko sesuai ketentuan secara berjenjang dan melibatkan seluruh pegawai	-Melakukan Sosialisasi Rencana Kinerja Pusakom Tahun 2026 dan Pembahasan Usulan Daftar Risiko Semester 1 Tahun 2026 -Menyiapkan usulan daftar risiko semester II tahun 2026 (Juli)	TW I 2026	Y	S-08	Nilai indeks manajemen risiko berpotensi tidak mencapai target

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Aktivitas pengendalian risiko dan dokumen risiko belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aktivitas pengendalian risiko	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aktivitas pengendalian risiko di Pusakom	TW I 2026	Y	S-08	Nilai indeks manajemen risiko berpotensi tidak mencapai target

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Kegiatan Tim kerja Manajemen Risiko yang mengawal pelaksanaan pengendalian risiko dengan menyusun daftar risiko sesuai ketentuan secara berjenjang dan melibatkan seluruh pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aktivitas pengendalian risiko setiap semester.

6) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target tahunan dengan realisasi kinerja

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk nilai kinerja anggaran adalah kategori 5. Berikut perbandingan realisasi dan target indikator ini pada tahun 2025

Tabel 37. Realisasi Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	100	Baik

Realisasi tahun 2025 senilai 5 telah dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100% dengan kategori capaian baik.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Nilai kinerja anggaran merupakan indikator yang secara rutin diukur oleh Pusakom secara tahunan. Berikut perbandingan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2020-2025

Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
2020	93	90,6	97,42	Baik
2021	90,7	88,956	98,08	Baik
2022	91,3	88,19	96,59	Baik
2023	92,5	89,03	96,25	Baik
2024	89,65	97,97	109,28	Sangat Baik
2025	5	5	100	Baik

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada 5 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan atas realisasi nilai kinerja anggaran pada tahun 2024. Adanya perubahan cara perhitungan pada tahun 2025, nilai kinerja anggaran mengalami perubahan nilai realisasi menjadi sistem konversi indeks 1-5 dimana nilai indeks 5 merupakan kategori sangat baik dari rentang nilai 90 hingga 100.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
Target jangka menengah yang harus dicapai oleh Pusakom untuk nilai kinerja anggaran adalah 5. Berdasarkan capaian di atas nilai kinerja anggaran pada tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025-2029. Berikut perbandingan realisasi dan target jangka menengah untuk indikator ini.

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 6 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi	Capaian %	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	100	 Melampaui

Target nilai kinerja anggaran Pusakom yang tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029 telah tercapai pada tahun 2025. Target indeks 5 merupakan target tertinggi atau nilai maksimal pada indikator ini. Maka yang perlu dilakukan adalah menjaga kinerja agar tetap mendapatkan nilai indeks 5 sampai periode jangka menengah selesai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Realisasi nilai kinerja anggaran ini juga dapat dibandingkan dengan unit kerja lain di BPOM yang serumpun. Pusakom dapat membandingkan capaian nilai kinerja anggaran dengan unit pusat-pusat di BPOM. Berikut perbandingan capaian kinerja antar unit.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 6 dengan Unit Kerja Lain

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	100	Baik 
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	5	5	100	Baik 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM	5	5	100	Baik 
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	5	5	100	Baik 

Apabila dilihat dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa dari semua realisasi nilai kinerja anggaran Pusakom dengan unit kerja pembanding mendapatkan nilai 5 pada indikator ini. Nilai maksimal diperoleh pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Peningkatan komitmen dari seluruh tim kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan plan on action dan rencana penarikan dana yang disusun,
- Pelaksanaan monitoring berkala baik oleh tim pengelola keuangan dan tim teknis terkait penyelesaian tagihan, pendaftaran kontrak dan pengelolaan UP/TUP,
- Pelaksanaan pelaporan capaian output yang tepat waktu dan berkualitas,
- Penggunaan rincian output SBKU “layanan BMN” yang mengakomodir pemanfaatan SBKU sesuai dengan kriteria penilaian EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran).

Rekomendasi upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 41. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Ketidaksesuaian realisasi rencana penarikan dana dan potensi penurunan nilai kinerja anggaran	1. Nilai Kinerja anggaran harus dioptimalkan ke depan tidak boleh lagi ada Keterlambatan pengadministrasian uang persediaan. 2. Melakukan koordinasi tim kegiatan dengan pengelola keuangan dalam rangka pemenuhan dokumen	Melaksanakan Anggaran dan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW I 2026 yang telah disusun - Melakukan revisi anggaran dan rencana penarikan dana sesuai kebutuhan - Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu Melaporkan progres capaian output tepat waktu	TW I 2026	Y	K-01, K-02, F-01, O-05, O-06	Keterlambatan proses administrasi atau pertanggungjawaban keuangan , Keterlambatan pembayaran pajak, Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai peraturan , Spesifikasi atau KAK pengadaan barang dan jasa yang disusun kurang jelas dan tidak lengkap, Pengurangan/pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pencapaian target/kinerja

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kegiatan ini adalah:

- Keikutsertaan pegawai Pusakom dalam workshop pelaksanaan anggaran pemerintah dari KPPN Jakarta IV.
- Penetapan staf pengelola keuangan yang terdiri dari PPK, PPSPM, KPA, Bendahara, Pengelola kegiatan, Pengelola BMN, Pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola gaji
- Monitoring penyelesaian kontrak dan ketepatan waktu pendaftaran kontrak serta penyelesaian tagihan secara berkala (triwulanan)
- Pelaksanaan revisi Anggaran dan revisi halaman III DIPA (rencana penarikan dana) secara periodik setiap triwulan.
- Pengadministrasian keuangan secara transparan dan tepat waktu.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Pusakom telah melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja interim triwulan III. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 42. Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Kendala TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Kegiatan belum dapat diukur hasilnya	Melakukan finalisasi dan pelaporan hasil analisis kebijakan tahun 2025 dan - Melakukan pengolahan data kemanfaatan hasil analisis kebijakan.	1. Melaksanakan tahapan analisis kebijakan sesuai dengan rencana timeline yang telah ditetapkan, 2. Melakukan pengolahan data kemanfaatan hasil analisis kebijakan. 3. Melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan tahun 2025	Selesai	Selanjutnya akan dilaksanakan: Melakukan survei kepuasan pelanggan internal Pusakom terhadap hasil analisis kebijakan tahun 2025.	TW I 2026	Y	O-01, S-01, R-01, S-04	Pelaksanaan analisis kebijakan yang tidak sesuai dengan Timeline, Penurunan kualitas hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, Penurunan persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, Jangkauan diseminasi/publikasi hasil analisis kebijakan kurang luas

No	Indikator	Kendala TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tidak terdapat kendala, penguku ran dilakukan setiap triwulan dan hasil sementara sudah tercapai target.	1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM 2. Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik.	Melaksanakan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan sesuai agenda dan melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik.	Selesai	Selanjutnya akan dilaksanakan: - Melaksanakan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan sesuai agenda dan - Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik	TW I 2026	Y	O-02, O-03	Kualitas bahan substansi Kepala BPOM tidak optimal, Terdapat arahan Kepala BPOM yang tidak masuk dalam daftar pemantauan pada aplikasi Sinergis
3	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Nilai pembangunan ZI 2025 berpotensi tidak tercapai (Realisasi sementara 85,88)	Melaksanakan rencana aksi ZI TW IV dan monitoring progress rencana aksi TW IV pada seluruh kelompok kerja	Melaksanakan rencana aksi ZI TW IV dan monitoring progress rencana aksi TW IV pada seluruh kelompok kerja	Selesai	-Melakukan identifikasi kekurangan implementasi pembangunan ZI di Pusakom berdasarkan hasil penilaian 2025 dan -Memasukkan tindakan perbaikan pada rencana kerja pembangunan ZI tahun 2026 -Melaksanakan rencana aksi	TW I 2026	Y	S-05, R-03, S-06, SDM-01,	Penurunan capaian indeks pembangunan ZI Pusakom, Penurunan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pusakom, Terdapat proses bisnis yang belum sepenuhnya

No	Indikator	Kendala TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						pembangunan ZI TW I 2026 dan monitoring progress rencana aksi TW I pada seluruh kelompok kerja				sesuai dengan dokumen Quality Management System (QMS) yang telah ditetapkan, Kinerja SDM kurang optimal
4	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Nilai AKIP PUSAKOM 2024 telah Meningkat menjadi 81,58 Namun target (82,76) tidak tercapai	-Menyusun dan finalisasi Renstra Pusakom 2025-2029 -Melakukan finalisasi RKT tahun 2026 -Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III -Menyusun Laporan Evaluasi Internal Triwulan III	-Menyusun dan finalisasi Renstra Pusakom 2025-2029 -Melakukan finalisasi RKT tahun 2026 -Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III -Menyusun Laporan Evaluasi Internal Triwulan III	Selesai	-Menyusun Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025 -Menyusun Laporan Kinerja Pusakom Tahun 2025 -Menyusun Laporan Tahunan Pusakom Tahun 2025	TW I 2026	Y	S-05	Penurunan capaian nilai AKIP PUSAKOM
5	Indeks Manajemen Risiko Pusat	Tidak ada kendala	-Melakukan monev pengendalian	-Melakukan monev pengendalian	Selesai	-Melakukan Sosialisasi Rencana Kinerja Pusakom	TW I 2026	Y	S-08	Nilai indeks manajemen risiko

No	Indikator	Kendala TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Analisis Kebijakan Obat dan Makanan		risiko periode triwulan III dan IV -Menyiapkan usulan daftar risiko semester 1 tahun 2026 (Desember)	risiko periode triwulan III dan IV -Menyiapkan usulan daftar risiko semester 1 tahun 2026 (Desember)		Tahun 2026 dan Pembahasan Usulan Daftar Risiko Semester 1 Tahun 2026 -Menyiapkan usulan daftar risiko semester II tahun 2026 (Juli)				berpotensi tidak mencapai target
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW IV yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW IV yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Selesai	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW I 2026 yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	TW I 2026	Y	K-01, K-02, F-01, O-05, O-06	Keterlambatan proses administrasi atau pertanggungjawaban keuangan, Keterlambatan pembayaran pajak, Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai peraturan, Spesifikasi atau KAK pengadaan barang dan jasa yang disusun

No	Indikator	Kendala TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										kurang jelas dan tidak lengkap, Pengurangan /pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pencapaian target/kinerja

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk dokumen akuntabilitas kinerja yang memberikan informasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan dan transparan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk perbaikan ke depan.

Laporan kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan usulan target kinerja di tahun 2026 dan bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan awal rencana anggaran biaya tahun 2027. Indikator Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang sudah dibahas pada Bab III Akuntabilitas kinerja menjadi bahan evaluasi dalam perumusan sasaran kegiatan dan target kinerja pada periode selanjutnya. Penyesuaian perencanaan kinerja yang dilakukan secara rinci berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 ini dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

A. Dasar penetapan target kinerja tahun 2025

Penetapan usulan target kinerja pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025 dan tren realisasi tahun 2020-2024. Berikut penyesuaian target indikator pada perencanaan periode mendatang:

Tabel 43. Kertas Kerja Penetapan Usulan Target 2026

Indikator Kinerja	Realisasi			Usulan Penetapan Target	Justifikasi
	2023	2024	2025	2026	
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	83,97	86,80	87,32	87,5	Target indikator ini mempertimbangkan realisasi tahun 2025 dan mengacu pada target Dokumen Renstra Pusakom Tahun 2025-2029, Target pada Renstra masih relevan target tahun 2026.

Indikator Kinerja	Realisasi			Usulan Penetapan Target	Justifikasi
	2023	2024	2025	2026	
Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	87,96	90,67	91,69	91,7	Realisasi tahun 2025 telah melebihi target tahun 2028 pada dokumen Renstra sehingga target tahun 2026 perlu disesuaikan lebih tinggi dari realisasi 2025.
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87,55	86,29	85,86	86	Penetapan Target tahun 2026 diusulkan berdasarkan realisasi tahun 2025 sebesar 85,86 dengan penyesuaian lebih tinggi sebesar 0,14 poin. Penetapan target 86 telah mempertimbangkan penurunan realisasi nilai RB Pusakom selama 2 tahun berturut-turut selama 2024-2025.
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	80,61	81,58	80,75	81	Target tahun 2026 diusulkan berdasarkan pertimbangan realisasi tahun 2025 yaitu 80,75 dengan penyesuaian penambahan nilai sebesar 0,25 poin. Penetapan target menjadi 81 telah mempertimbangkan penurunan capaian realisasi nilai AKIP Pusakom selama 2 tahun berturut-turut yaitu 2024-2025.

Indikator Kinerja	Realisasi			Usulan Penetapan Target	Justifikasi
	2023	2024	2025	2026	
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	2,844	2,969	3,37	3,37	Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sama dengan realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 3,37 karena realisasi 2025 telah melampaui renstra 2029.
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,61	97,97	5	5	Target sesuai dengan Renstra dan RKT

B. Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja
 Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 di Pusakom mendapatkan penyesuaian anggaran di tengah tahun untuk kebutuhan pemenuhan operasional perkantoran pegawai baru.

Tabel 44. Penyesuaian Anggaran Pusakom Tahun 2025 pada PK 2025

No	Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	248.790.000	248.790.000
2	DR.4135 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	8.679.845.000	8.563.981.000
3	WA.6383 - Pengelola Sarana dan Prasarana BPOM	3.828.441.000	4.295.861.000
Total		12.757.076.000	13.108.632.000

3.4. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2025 Revisi DIPA 8 tanggal 15 Desember 2025 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki dua alokasi anggaran pada Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp8.812.771.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.314.861.000,00 seluruhnya merupakan Rupiah Murni (RM) total anggaran sebesar Rp13.127.632.000,00.

Berdasarkan kebijakan efisiensi APBN pada tahun 2025, Pusakom telah melakukan blokir anggaran pada total pagu di atas sebesar Rp7.906.298.000,00. Pemblokiran efisiensi ini tidak dilakukan pembukaan hingga akhir periode anggaran 2025 sehingga Pagu Anggaran bersih Pusakom yang dapat digunakan adalah senilai Rp5.221.334.000,00. Realisasi anggaran Pusakom pada tahun 2025 berdasarkan perubahan pagu tersebut adalah sebesar 99,98% atau Rp5.220.173.240,00.

A. Realisasi Kinerja dan Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 berada di peringkat 21 di lingkup unit kerja pusat BPOM. Berikut rincian realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan per indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pusakom Tahun 2025:

Tabel 45. Realisasi Kinerja dibanding dengan Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (ribu Rp)		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87	87,32	100,37	963.500	962.908	99,94
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91,69	100,76	334.427	334.423	99,99
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	85,86	99,26	193.434	193.396	99,98
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	80,75	98,48	17.774	17.771	99,99
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	100	3.695.564	3.695.037	99,99
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	3,37	111,96	16.635	16.634	99,99

B. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan pada Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki dua (2) sasaran kegiatan yaitu Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya Analisis dan Rekomendasi

Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas dan Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal yang langsung diturunkan dari Sasaran Program BPOM yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Sasaran Program BPOM yaitu Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima. Adapun realisasi anggaran per sasaran kegiatan Pusakom disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 46. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan pada Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Rp1.297.332.558,00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Rp3.922.840.682,00
TOTAL		Rp5.220.173.240,00

C. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Perbandingan rencana dan realisasi anggaran per kegiatan 2025 menyajikan pagu anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang dapat digunakan adalah sebesar Rp5.221.334.000,00. Realisasi anggaran Pusakom pada tahun 2025 sebesar 99,98% atau Rp5.220.173.240,00. Realisasi per masing-masing kegiatan sudah dioptimalkan penggunaan anggarannya dan telah dilakukan alokasi penempatan dana agar terserap dengan optimal ke beberapa kegiatan yang lebih berpotensi penyerapan anggarannya. Secara rinci rencana pendanaan dan realisasi anggaran per kegiatan di tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

No	Nama RO / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Pagu Pasca Blokir	Realisasi	% Capaian
Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9.000.000	8.496.947	94,41
Perangkat pengolah data dan komunikasi (Seluruh anggaran diblokir)				
2	Pengadaan Alat Pengolah Data (Seluruh Anggaran diblokir)	n/a	n/a	n/a
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
3	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	42.900.000	42.897.152	99,99
4	Forum Konsultasi Rencana Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	22.198.000	22.182.500	99,93
5	Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	16.424.000	16.423.851	99,99
6	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025	357.456.000	357.452.917	99,99
7	Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC	32.931.000	32.929.727	99,99
8	Advokasi kebijakan dan Policy Advisory	73.238.000	73.237.377	99,99
9	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	39.205.000	39.204.066	99,99
10	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan	110.890.000	110.830.667	99,95
11	Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	34.465.000	34.464.264	99,99
12	Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (In House Training)	58.329.000	58.328.800	99,99
13	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2025	157.188.000	157.185.789	99,99
14	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	76.305.000	76.303.310	99,99
15	Pengembangan Sistem Informasi PUSAKOM	34.200.000	34.197.300	99,99
16	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	48.555.000	48.553.723	99,99

No	Nama RO / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Pagu Pasca Blokir	Realisasi	% Capaian
17	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	236.735.000	236.734.445	99,99
18	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	49.137.000	49.135.675	99,99
<i>Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan</i>				
19	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	16.635.000	16.634.876	99,99
20	Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi	22.042.000	22.017.200	99,89
21	Penerapan Sistem Mutu	17.774.000	17.771.600	99,99
22	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	39.563.000	39.553.257	99,98
23	Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	n/a	n/a	n/a
<i>Layanan Perkantoran PUSAKOM</i>				
24	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.152.738.000	3.152.391.337	99,98
25	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	14.978.000	14.977.040	99,99
26	Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.051.000	80.037.037	99,98
27	Perawatan Kendaraan Kantor	32.550.000	32.484.366	99,80
28	Langganan Daya dan Jasa	4.380.000	4.299.132	98,15
29	Operasional Perkantoran	408.403.000	408.401.470	99,99
30	Pemeriksaan Kesehatan	30.600.000	30.600.000	100
<i>Layanan BMN</i>				
21	Penatausahaan BMN PUSAKOM	2,464,000	2,447,415	99,33
	TOTAL	5.221.334.000	5.220.173.240	99,98

Sumber data: Aplikasi SAKTI diolah, data per 31 Desember 2025

D. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja Sasaran

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung % capaian output dan % capaian input. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur indeks efisiensi:

$$\text{Indeks Efisiensi} = \% \text{Capaian Output} \div \% \text{Capaian Input}$$

Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), nilai SE adalah 1. Apabila nilai $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien. Apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Tabel 47. Analisis Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	IE	TE	Keterangan
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	100,56	99,97	1,00	$IE = 1$	Efisien
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	102,42	99,99	1,02	$IE > 1$	Efisien
Kesimpulan		101,83	99,98	1,01	$IE > 1$	Efisien

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah menggunakan sumber daya yang tersedia yaitu input berupa anggaran yang dikelola dengan baik dan output kinerja dengan upaya yang maksimal. Diperoleh perhitungan indeks efisiensi sasaran kegiatan 1 senilai 1,00 maka kegiatan dianggap efisien dan sasaran kegiatan 2 senilai 1,02 maka kegiatan juga dianggap efisien. Kemudian diperoleh tingkat efisiensi dari rata-rata indeks efisiensi diperoleh nilai 1,01 maka kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun anggaran 2025 telah efisien menggunakan sumber daya yang tersedia.

Tabel 48. Analisis Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KET.
Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	100,37	99,94	1,00	IE = 1	Efisien
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	100,76	99,99	1,01	IE > 1	Efisien
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	99,26	99,98	0,99	IE < 1	Tidak Efisien
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	98,48	99,99	0,98	IE < 1	Tidak Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	100	99,99	1,00	IE = 1	Efisien
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	111,96	99,99	1,11	IE > 1	Efisien

Dari tabel 48, efisiensi penggunaan anggaran per indikator kinerja, dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator kinerja yang telah diidentifikasi tingkat efisiensi anggarannya “tidak efisien”, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya teridentifikasi telah “efisien” memanfaatkan anggaran dalam upaya pencapaian targetnya. Dua indikator kinerja yang inefisiensi penggunaan anggarannya adalah:

1. Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Penggunaan anggaran untuk mencapai target pembangunan ZI tahun 2025 dianggap tidak efisien karena alokasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini belum mampu mendorong tercapainya target tahun 2025. Alokasi anggaran sebesar Rp193.434.000,00 telah terealisasi sebesar 99,98% untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai pembangunan ZI Pusakom, pembuatan video AOC dan rencana aksi RB lainnya, namun dampak kegiatan ini belum cukup signifikan dalam mendorong pencapaian target tahun 2025 dengan capaian 99,26%. Perumusan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan ZI ke depan perlu ditinjau kembali efektivitasnya dalam mendorong pencapaian target ini. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan zona integritas tahun 2025 dari Inspektorat Utama.

2. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator AKIP Pusakom belum sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian target AKIP tahun 2025. Alokasi anggaran Rp17.774.000,00 telah terealisasi 99,99% untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusakom. Realisasi nilai AKIP Pusakom dari 2025 memperoleh nilai 80,75 turun dari realisasi tahun 2024 yaitu 81,58 di tahun 2024, perolehan nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 82.

Penurunan nilai dikarenakan terjadi perubahan komponen pada penilaian dari AKIP tahun 2025. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah penurunan pada komponen capaian kinerja, yaitu penilaian AKIP tahun 2025 dipengaruhi oleh kemampuan unit kerja dalam mencapai kinerja tahun sebelumnya. Terdapat tiga indikator kinerja Pusakom yang tidak tercapai pada tahun 2024. Rencana ke depan kegiatan yang dan alokasi anggaran yang disusun dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Pusakom harus mempertimbangkan rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP Pusakom tahun 2025.

Tabel 49. Analisis Tingkat Efisiensi per *Output*

No	Nama RO / Kegiatan	Volume Output			Anggaran (ribu Rp)			IE	TE	Ket.
		Target pasca Blokir	Realisasi Fisik	% Capaian	Pagu Pasca Blokir	Realisasi	% Capaian			
1	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	100	9.000	8.496	94,41	1,05	IE > 1	Efisien
2	Perangkat pengolah data dan komunikasi (Anggaran diblokir seluruhnya)	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anggaran diblokir seluruhnya
3	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	5	5	100	1.390.156	1.390.061	99,99	1,00	IE = 1	Efisien
4	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	5	5	100	96.014	95.976	99,96	1,00	IE = 1	Efisien
5	Layanan Perkantoran PUSAKOM	1	1	100	3.723.700	3.723.190	99,99	1,00	IE = 1	Efisien
6	Layanan BMN	1	1	100	2.464	2.447	99,33	1,00	IE = 1	Efisien
Total					5.221.334	5.220.173	99,98	1,00	IE = 1	Efisien

Analisis efisiensi per *output* tahun 2025 menandakan seluruh *output* Pusakom telah tercapai targetnya dan anggaran yang dialokasikan untuk menghasilkan *output* tersebut juga terealisasi secara optimal. *Output* yang dihasilkan berupa laporan hasil rekomendasi kebijakan, laporan koordinasi, laporan dokumen layanan perkantoran, dan barang penunjang kegiatan. Terdapat satu *output* yang tidak dapat direalisasikan karena seluruh alokasi anggaran pada output diblokir maka tidak terdapat menghasilkan *output*. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh anggaran yang digunakan dalam mencapai target *output* Pusakom telah dapat digunakan secara efisien.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Dalam dokumen tersebut di tahun 2025 terdapat 2 (dua) sasaran kinerja yang diukur ketercapaiannya melalui 6 (enam) indikator kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja satuan kerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja, terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja “Sangat Baik” dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja “Baik” dan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Berikut uraian capaian untuk setiap indikator.

- Indikator Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan (terrealisasi di atas target, dengan kategori “Sangat Baik”)
- Indikator Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan (terrealisasi di atas target, dengan kategori “Sangat Baik”)
- Indikator Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (terrealisasi di bawah target, dengan kategori “Baik”)
- Indikator Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (terrealisasi di bawah target, dengan kategori “Baik”)
- Indikator Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (terrealisasi di atas target, dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”)
- Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (terrealisasi sesuai target, dengan kategori “Baik”)

Dari sisi anggaran, penyerapan anggaran Pusakom pada tahun 2025 adalah sebesar 39,76% yaitu Rp5.220.173.240,00 (Lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp13.127.632.000,00 (Tiga belas miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pada tahun 2025 Pusakom mengalami blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebanyak Rp7.906.298.000,00. Penyerapan di atas dihitung tanpa mengurangi blokir anggaran tahun 2025. Apabila dihitung realisasi anggaran yang tidak termasuk blokir, maka realisasi anggaran Pusakom tahun 2025 adalah senilai 99,98% dari pagu tanpa blokir Rp5.221.334.000,00.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan beberapa permasalahan utama ketidaktercapaian indikator Indeks Pembangunan ZI adalah

- Mekanisme pembentukan tim pembangunan RB belum dilengkapi kriteria pengukuran yang jelas;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI belum didokumentasikan setiap bulan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ZI belum dilengkapi bukti tindak lanjut;
- Laporan pelaksanaan rencana aksi agen perubahan belum mengukur dampak perubahan dari rencana aksi;
- Penggunaan subsite resmi pom.go.id sesuai tugas dan fungsi unit kerja belum dapat menggambarkan inovasi unit kerja;
- Perubahan subsite resmi belum terdokumentasi pada monitoring penggunaan teknologi informasi;
- Belum tersedia fasilitas pengaduan yang terhubung langsung ke Kepala Unit Kerja;
- Belum dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan;
- Jumlah layanan belum sesuai standar layanan dan belum terdapat pengukuran kemudahan dari layanan publik yang diberikan

Permasalahan utama ketidaktercapaian indikator Nilai AKIP 2025 adalah:

- Kelengkapan dokumen perencanaan seperti kertas kerja penilaian SMART dan reviu target kinerja belum cukup memadai
- Dokumen SAKIP belum dipublikasikan seluruhnya melalui subsite unit kerja
- Belum terdapat keselarasan pelaporan data kinerja pada berbagai bentuk laporan yang disusun periodik
- Pelaporan kinerja belum tersusun secara sempurna karena terdapat beberapa informasi kinerja yang belum lengkap
- Penyusunan laporan evaluasi internal belum menyajikan Identifikasi kendala dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi setiap periodenya.
- Capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis Pusakom tahun 2024 antara lain adalah:

1. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan harus melakukan perbaikan pelaksanaan dan implementasi ZI dan SAKIP untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP dan Indeks RB.
2. Upaya perbaikan pencapaian Indeks Pembangunan ZI dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa hal berikut:
 - Melengkapi mekanisme pembentukan tim pembangunan ZI dengan kriteria pengukuran yang jelas;
 - Mendokumentasikan kegiatan pembangunan ZI setiap bulan;
 - Melengkapi laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ZI dengan bukti tindak lanjut;
 - Melakukan pengukuran dampak atas rencana aksi agen perubahan;
 - Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut;
 - Melaporkan perubahan subsite resmi pada monitoring penggunaan teknologi informasi;
 - Memfasilitasi saluran pelaporan pengaduan yang terhubung langsung ke Kepala Unit Kerja;
 - Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan dan menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil survei kepuasan pelanggan;
 - Melakukan pengukuran kemudahan dari layanan publik yang diberikan dan menyesuaikan jumlah layanan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan;
 - Meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
 - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran;
 - Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
3. Upaya perbaikan pencapaian Nilai AKIP dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa hal berikut:
 - Menyusun kelengkapan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman SAKIP
 - Mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite unit kerja dan e-SAKIP REVIU

- Memastikan keselarasan dan validitas sumber data kinerja untuk memastikan data kinerja yang dilaporkan pada seluruh platform pelaporan kinerja dapat sama dan valid.
 - Menyusun laporan kinerja dan laporan evaluasi internal sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM
4. Melakukan penetapan target kinerja tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi indikator tahun 2025
 5. Meningkatkan dan mempertahankan pencapaian indikator Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan, Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan, Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, yang pada tahun 2025 realisasinya telah berada di atas target.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

1. Perhitungan Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Judul Kajian	Indeks Kemanfaatan	Relevan	Aktual	Kuantitas	Inovatif/ Inspiratif
1	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	86,98	87,38	86,43	87,62	85,71
2	Analisis Efektivitas Implementasi Konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM	85,40	86	84	86	86
3	Analisis Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	82,33	81,67	80	88,33	80
4	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC): Evaluasi Implementasi INARAC for Food Safety	93,00	95	90	95	90
5	Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025	83,63	85,19	81,48	83,7	83,7
6	Kajian Perkuatan RegLab dengan Pembentukan Regional Papua	79,67	80	80	78,33	80
7	Kajian Terkait Kebijakan Pelarangan Pegawai BPOM Bekerja di Sarana yang Berada di bawah Pengawasan BPOM.	86,28	89,44	83,89	82,22	88,89
8	Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku	90,78	91,67	88,89	90,56	93,33

No	Judul Kajian	Indeks Kemanfaatan	Relevan	Aktual	Kuantitas	Inovatif/ Inspiratif
	Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024					
9	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024	91,89	93,21	90,36	91,79	91,43
10	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024	89,42	90,61	89,39	88,79	86,06
11	Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM)	85,00	85	90	80	80
Total		87,32	88,48	86,17	87,12	86,52

Indikator Kinerja	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/Turun
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	86,80 %	87,32 %	Meningkat 0,52%

2. Hasil Perhitungan Tingkat Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Koordinasi pada penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala BPOM sebelum pelaksanaan kegiatan	92,37
2	Koordinasi pada pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi Kepala Badan POM pada hari pelaksanaan kegiatan	90,73
3	Koordinasi penyampaian notulen/laporan pasca pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM	91,96
Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP		91,69

3. Perhitungan Indeks Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Penilaian	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
Komponen Pengungkit	60,00				
Manajemen Perubahan	8,00	2,95	4,00	6,95	MS
Penataan Tatalaksana	7,00	2,60	2,50	5,10	MS
Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,40	4,25	8,65	MS
Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,58	3,75	7,33	MS
Penguatan Pengawasan	15,00	6,73	7,50	14,23	MS
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,36	4,69	9,05	MS
TOTAL PENGUNGKIT				51,29	MS
Komponen Hasil	40,00				
Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,78	
Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,28	MS
Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,79	
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,79	MS
TOTAL HASIL				34,57	
NILAI PMPZI				85,86	

4. Perhitungan Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

No	Komponen	Bobot	2024	2025	Keterangan (Kenaikan / Penurunan Nilai)
1	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0
2	Pengukuran Kinerja	24	18,48	19,68	+1,20
3	Pelaporan Kinerja	12	8,88	9,84	+0,96
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	16,80	+1,60
5	Capaian Kinerja	20	18,86	14,27	-4,59
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,58	80,75	-0,83
	Predikat		A	A	Tetap

5. Perhitungan Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/Turun
Jumlah Nilai	47,50	54,00	6,50
Nilai Maturitas	2,969	3,37	0,406
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Defined</i>	

6. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Komponen Nilai Kinerja Anggaran	Nilai 2024	Nilai 2025
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	100	100
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,94	96,78
Total Nilai (EKA x 50%) + (IKPA x 50%)	97,97	98,39

B. Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSIDAR THAMRIN

Jabatan : Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat
dan Makanan

SYAMSIDAR THAMRIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	01 - Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.5 Indeks
		02 - Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82 Nilai
		03 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.01 Indeks
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5 Indeks
2.	03 - Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	01 - Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87 Persen
		02 - Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	91 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 13,108,632,000 (Tiga Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	248,790,000
2.	DR.4135 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	8,563,981,000
3.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,295,861,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

SYAMSIDAR THAMRIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	02 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	01 - Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan												86.5	442,311,000
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi		49,203,000		49,203,000				
			2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - Pemeriksaan Kesehatan		115,000,000		115,000,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		3.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan			H - Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (In House Training)			138,630,000			138,630,000		
		4.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	051 - Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan			A - Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan			29,320,000			29,320,000		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			D - Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga			92,205,000			92,205,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			E - Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan			17,953,000			17,953,000		
		02 - Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan											82		59,201,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Obat dan Makanan													
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - Langganan Daya dan Jasa		8,400,000		8,400,000				
			2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Pengadaan Perlengkapan Kantor		290,183,000		290,183,000				
			3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Perawatan Kendaraan Kantor		115,290,000		115,290,000				
			4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor		123,850,000		123,850,000				
			5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Penatausahaan BMN PUSAKOM		7,648,000		7,648,000				
			6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Operasional Perkantoran		501,752,000		501,752,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan			3,133,738,000			3,133,738,000		
2.	03 - Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	01 - Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan											87	7,585,285,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4135.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data			11,578,000			11,578,000		
		2.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan			D - Advokasi kebijakan dan Policy Advisory			151,400,000			151,400,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			Makanan yang dimanfaatkan	Obat dan Makanan											
		3.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		E - Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025		281,510,000		281,510,000					
		4.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		F - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan		160,468,000		160,468,000					
		5.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		G - Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025		2,801,688,000		2,801,688,000					
		6.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	053 - Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan		B - Publikasi Hasil Analisis Kebijakan		235,700,000		235,700,000					
		7.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	053 - Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan		C - Pengembangan Sistem Informasi		13,650,000		13,650,000					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	Rekomendasi Kebijakan		PUSAKOM									
		8.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		B - Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu		2,763,504,000		2,763,504,000					
		9.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		A - Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025		83,750,000		83,750,000					
		10.	DR.4135.CAB.001 - Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		9,000,000		9,000,000					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		11.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	053 - Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan			A - Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2025			632,707,000			632,707,000		
		12.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	052 - Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan			C - Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC			440,330,000			440,330,000		
		02 - Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	0	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	810,746,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	054 - Dukungan Strategis Pimpinan			A - Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan			114,651,000			114,651,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				054 - Dukungan Strategis Pimpinan		B - Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan			504,211,000		504,211,000	
		3.	DR.4135.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				054 - Dukungan Strategis Pimpinan		C - Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan			191,884,000		191,884,000	
												Total	13,108,632,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

SYAMSIDAR THAMRIN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.09.24.127 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN DI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

Plt. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN



ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS
KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.09.24.127 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS
KEBIJAKANOBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	85,46%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,2
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,2
		Nilai Kinerja Anggaran	90

Plt. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN



ANTONIUS TARIGAN